

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD NEGERI HARAPAN  
MAKMUR KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN  
MUARA LAKITAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan  
Pendidikan Program Studi Strata Satu  
Pada Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**DONDY EKKI DEONARDO**

**NIM : 216.02.0005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BINA INSAN  
LUBUKLINGGAU  
2020**

Dondy Ekki Deonardo (2016). *Evaluation of the Management of School Operational Assistance Funds for SD Negeri Harapan Makmur, Musi Rawas Regency, Muara Lakitan District*  
*Undergraduate Thesis (S1) Program at Bina Insan Lubuklinggau University.*  
*Advisor (I) Mrs. Dewi Anggraini SE.MSi and Advisor (II) Mrs. Yuli Nurhayati SE, AK M.Si*

## **ABSTRACT**

*The School Operational Assistance Fund (BOS) is a government program which is basically for the provision of non-personnel operating costs for basic education units as the implementer of the compulsory education program. The analytical method used is descriptive qualitative analysis method. The results show that (1) Planning for BOS funds is in accordance with the 2019 BOS Technical Guidelines because it is seen from Government Regulation Number 3 of 2019 concerning education funding from BOS funds obtained by SD Negeri Harapan Makmur which comes from the State Budget (APBN) for 2019 is IDR 157,600,000 / year, - (2) Implementation of BOS funds, especially the allocation is in accordance with the 2019 Technical Guidelines for BOS, because in the allocation, filling in dapodikdasmen data (3) the distribution of BOS funds is in accordance with the 2019 technical guidelines, namely by going through two stages (4 ) The use of BOS funds is in accordance with the 2019 Technical Guidelines for BOS, in the form of 11 components that can be funded by BOS funds. (5) not all of the supervision has been carried out due to the lack of direct supervision from the school committee (6) Reporting the accountability of BOS funds is in accordance with the 2019 Technical Guidance, only there are no banners information, and for external reports it is in accordance with the reports made every quarter.*

*Keywords: Management Evaluation, School Operational Assistance Fund (BOS)*

Dondy Ekki Deonardo (2016). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Harapan Makmur Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan*. Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Pembimbing (I) Ibu Dewi Anggraini SE,MSi dan Pembimbing (II) Ibu Yuli Nurhayati, SE,AK. M.Si

## **ABSTRAK**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan dana BOS sudah sesuai Juknis BOS 2019 karena dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pendanaan pendidikan dari dana BOS yang didapatkan SD Negeri Harapan Makmur yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2019 adalah Rp.157.600.000/tahun,-(2)Pelaksanaan dana BOS khususnya pengalokasian sudah sesuai dengan Juknis BOS 2019, karena dalam pengalokasian melakukan pengisian data dapodikdasmen (3)penyaluran dana BOS sudah sesuai dengan juknis 2019 yaitu dengan melalui dua tahapan (4) Penggunaan dana BOS sudah ssesuai dengan Juknis BOS 2019, berupa 11 komponen yang bisa dibiayai dana BOS.(5)pengawasan belum semuanya dilakukan karena kurangnya pengawasan langsung dari komite sekolah(6) Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS sudah sesuai Juknis 2019 hanya saja tidak adanya spanduk informasi, dan untuk laporan ekstern sudah sesuai dengan dibuat laporan setiap triwulan.

Kata Kunci : Evaluasi Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji serta syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, karenanya dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Proposal Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Tujuan penelitian ini untuk Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) studi kasus SD Negeri Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini sudah selayaknya penulisan menyampaikan ucapan rasa terima kasih atas bimbingan dan bantuan serta kerjasama yang baik sehingga peneliti proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. H. Sardiyo selaku Rektor UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUK LINGGAU.
2. Bapak Sutanta, Ph.D selaku Wakil Rektor I UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUK LINGGAU.

3. Bapak Wakhid Mukhlis, M.Pd selaku Wakil Rektor II UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU.
4. Bapak Yusup, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Ekonomi UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUK LINGGAU.
5. Ibu Indrawati Mara Kesuma, SE.M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU.
6. Ibu Yuli Nurhayati SE.AK. selaku dosen pembimbing II.
7. Ibu Dewi Anggraini SE.M.Si selaku dosen pembimbing I.
8. Seluruh Dosen Dan Karyawan UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU yang selalu memberi ilmu dan pengetahuannya.
9. Seluruh keluarga terkhusus yang sangat saya sayangi dan banggakan karena selalu mendukung dan membantu dalam setiap situasi hingga saat ini untuk kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku.
10. Teman-teman seperjuangan dan pihak-pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua budi baik yang telah diberikan.

Demikian juga halnya dalam penulisan Proposal Skripsi ini, Mohon Maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan. Semoga Proposal ini dapat berguna bagi pembaca.

Lubuklinggau, September 2020

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Siswa Penerima Dana BOS.....	26
Tabel 2. Penelitian Relevan.....	35
Tabel 3. Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4. Daftar Jumlah Penerima Dana BOS.....	47
Tabel 5. Alokasi Penggunaan Dana BOS.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir .....	38
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekolah.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	
Lampiran 2. Lembar Bimbingan Proposal Skripsi.....	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 4. Surat Balasan dari tempat penelitian.....	
Lampiran 6. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	
Lampiran 7. Lembar Bimbingan Skripsi.....	
Lampiran 9. Wawancara.....	
Lampiran 10. Dokumentasi.....	



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Didalam sejarah dunia, lebih tepatnya dibidang pendidikan adalah salah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan setiap manusia. Pendidikan mempunyai sumbangsih yang besar dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan sosial sumber daya manusia dalam sebuah bangsa terutama dibidang pendidikan.pendidikan yang baik dan bermutu dapat menggambarkan bahwa sebuah negara tersebut memiliki pencapaian yang baik, maka negara tersebut dapat dikatakan Negara maju. Diindonesia sendiri memiliki misi dan tujuan untuk menjadikan penduduknya memiliki ahlakul khorimah atau berakhlak mulia dengan mempraktekan keimanan dan keyakinanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan perilaku terhadap kehidupanya sehari-hari, cakap, mandiri,kreatif dan senantiasa bertakwa, juga memiliki rasa tanggung jawab dan cinta akan tanah air indonesia.

Dalam hal ini pun tak luput dari beberapa isu yang ada mengenai biaya pendidikan yang semakin tinggi tiap tahunnya, maka dengan ini pemerintah terus memperjuangkan subsidi pendidikan dalam bentuk dana operasional sekolah (BOS) dan lainnya, melalui anggaran biaya pendidikan negara dan daerah sebanyak 20% yang mana tertulis didalam undang-undang tahun 2008 No 48 dan akan terus diperjuangkan hingga saat ini. Serta untuk meningkatkan kesejahteraan setiap guru, hal ini sering kali bertolak belakang dengan kebijakan yang ada di Indonesia didalam praktek realisasinya. Setelah dikaji mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia dengan melakukan pendekatan makro. Namun kesenjangan sosial ini seharusnya bisa diatasi dengan mudah oleh pihak yang sudah kompeten didalam mengatasi masalah keuangan disektor pendidikan di negara ini. Yang mana menurut “prajudi atmosudirjo1982’ pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam yang ada untuk mencapai setiap tujuan tertentu adalah contoh dari kegiatan defenisi pengelolaan.

Jadi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini berasal dari anggaran biaya pendidikan negara dan daerah yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan yang semakin tinggi yang harus dibayarkan masyarakat setiap tahunnya, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat atas tingginya

biaya pendidikan maka biaya pendidikan dapat dialokasikan pada kebutuhan yang lain, agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan pendidikan yang layak dan bermutu untuk menjadi sumber daya manusia yang berkompeten. Namun hal ini harus sesuai dan mengikuti peraturan dan pedoman yang ada sehingga Pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan dana operasional sekolah (BOS) tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Yang mana telah dibuat oleh Direktorat Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut (Fitri A 2014) pengembangan sekolah secara menyeluruh akan menjadi dasar perencanaan dan penggunaan dana BOS, baik jangka panjang maupun pendek. Yang dimaksud pengembangan jangka panjang yaitu didalam periode lima tahun kedepan sedangkan pengembangan jangka pendek hanya dalam periode satu tahun atau lebih.

Bantuan (BOS) yang diterima tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan serta dilaporkan setiap aktivitasnya kepada pihak pendidikan provinsi dan pusat sebagai pengawas dari pihak luar dan dapat dipertanggung jawabkan juga oleh pihak Komite dan Dinas Kependidikan Kabupaten sebagai pengawas internal. Secara umum yang dilaporkan adalah

mengenai aktivitas penggunaan kas dalam proses realisasinya dana (BOS) tersebut.

Untuk mengetahui mengenai pengelolaan dana BOS maka peneliti fokus untuk Mengatahui mengenai dana (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang mana lebih khususnya mengenai pengelolaan yang dimulai dari pelaksanaan, penggunaan, pelaporan dan perencanaan serta pertanggung jawaban dana BOS apakah sudah sesuai pedoman direktorat dan juknis yang ada dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019. dan subfokus mengenai bantuan dana operasional sekolah (BOS) .

Berdasarkan informasi bahwasanya dalam periode 2019 SD Negeri Harapan Makmur telah menerima bantuan dana operasional sekolah yang merupakan program pemerintah tersebut, yang mana dalam hal ini sebanyak 197 siswa dari 215 yang menerima bantuan dana BOS dengan besaran Rp.800.000 per orangnya. dengan presentase sebagai berikut :

**TABEL 1.1 DAFTAR SISWA PENERIMA DANA BOS**

<b>KELAS</b>	<b>Jumlah siswa</b>
Kelas 1	29 siswa
Kelas 2	29 siswa
Kelas 3	35 siswa
Kelas 4	32 siswa
Kelas 5	34 siswa
Kelas 6	38 siswa

Berdasarkan informasi yang didapat melalui beberapa wawancara kecil terhadap beberapa narasumber diantaranya adalah beberapa guru yang mana dalam periode sebelumnya lebih tepatnya 5 tahun lalu, proses pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih sangat kurang dari pembukuan, dan pelaporan, pengawasan langsung oleh komite sekolah, pengelolaan, dan pertanggung jawaban. seperti yang tertulis dalam juknis Tujuan pemerintah menerbitkan buku peraturan mengenai pengelolaan dana BOS agar dilaksanakan dengan tertib, transparansi, akutanbel, efisien dan efektif, tepat didalam penyaluran, dan terhindar dari penyimpangan, yang mana hal tersebut dituliskan didalam sebuah buku. sehingga dapat mengerti cara menggunakan dan mempertanggung

jawabkan dana tersebut dengan sesuai peraturan yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan laporan yang ada kepada Kepala Dinas dan wali murid. Berdasarkan topik diatas, dalam hal ini untuk menyelesaikan pendidikan akhirnya maka peneliti tertarik untuk menyelesaikan tugas akhir dengan mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana BOS yang dikelola oleh sekolah khususnya dalam proses pengelolaan dana BOS, tujuannya untuk melakukan evaluasi dalam periode 2019 untuk mengetahui apakah proses pelaporan serta pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan pembukuan peraturan pemerintah didalam juknis BOS reguler. maka peneliti menentukan penelitian yang berjudul tentang **“Evaluasi Pengelolaan Dana Operasional (BOS) studi kasus SD Negeri Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas”**.

## **1.2 Fokus penelitian**

Untuk mengetahui mengenai (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur.

**-Sub fokus penelitian**

Subfokus penelitian mengenai bantuan dana operasional sekolah (BOS) apakah didalam pengelolaanya sudah sesuai. Tentang perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut Sutrisno Hadi (1973 : 3) “masalah merupakan suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa serta kenapa”

Sedangkan menurut Patriata Westra (1981 : 263) Rumusan masalah ialah “ sebuah masalah yang terjadi jika seseorang itu kemudian berusaha untuk mencoba suatu tujuan atau pun juga percobaan yang pertama untuk bisa atau dapat mencapai tujuan tersebut sampai berhasil, Berikut ini beberapa rumusan masalah didalam penelitian Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasioanal sekolah SD Negeri Harapan Makmur :

- a. Bagaimana perencanaan ‘Dana (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur’Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?
- b. Bagaimana pelaksanaan Dana (BOS) yang ada di SD Negeri Harapan MakmurKecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?
- c. Bagaimana mengenai pengawasan, pertanggung jawaban dan Evaluasai Dana (BOS) di SD Negeri Harapan MakmurKecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?

d. Bagaimana pelaporan mengenai Dana (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?

#### **1.4 Batasan Masalah**

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Harapan Makmur, dengan fokus penelitian Dana (BOS). Bertempat di Kabupaten Musi Rawas kecamatan muara lakitan.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan yang dilakukan punya suatu tujuan tertentu tanpa terkecuali mengenai penelitian evaluasi. tujuan mengevaluasi ialah untuk mengetahui proses keberhasilan di dalam suatu program tertentu. Tujuan evaluasi berbeda-beda tergantung dari konsep dan tujuan tertentu tentang evaluasi (latief : 2010) sedangkan disini peneliti melakukan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tentang pencatatan ataupun laporan dana (BOS) telah sesuai dengan peraturan serta prosedur yang ada, Dengan rincian sebagai berikut :



- a. Untuk mengevaluasi pengelolaan Dana (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur Kabupaten Musi Rawas kecamatan muara lakitan khususnya dalam hal perencanaan.
- b. Untuk mengetahui tentang realisasi atau pelaksanaan Dana (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- c. Untuk mengetahui pertanggung jawaban, dan Evaluasi Dana (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- d. Untuk mengetahui pelaporan dan pengawasan Dana (BOS) di SD Negeri Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

## **1.6 Manfaat Penelitian**

adalah hasil dari penelitian atau hal bermanfaat yang bisa dipakai nanti, baik bagi kepentingan pengembangan sebuah program maupun kepentingan mengenai ilmu pengetahuan.

Yang mana hasilnya dapat bermanfaat :

- a. Bagi Peneliti : sebagai salah satu cara menerapkan ilmu dan metode selama proses perkuliahan serta menganalisa dan menyelesaikanya.
- b. Bagi Sekolah : sebagai bahan evaluasi atas pencapaian ,kemajuan dan kelangsungan sekolah.

- c. Bagi universitas Bina Insan khususnya fakultas Ekonomi :  
sebagai sumber referensi mahasiswa lainya khususnya  
program studi akuntansi.
- d. Bagi Pembaca: sebagai bahan referensi untuk penelitian  
selanjutnya yang bersifat sumber acuan dan bahan  
perbandingan Bagi Pihak lainya : Hasil penelitian ini semoga  
dapat bermanfaat untuk bidang kajian yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur**

##### **2.1.1 Dana Bantuan Operasional (BOS)**

Dana (fund) adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (*self balancing*) untuk membuktikan kas dan sumber lainya bersama dengan utang,kewajiban, cadangan,dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi,atau limitasi yang ada (arifin dan imam 2001:10)

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah. Saat ini, dana BOS terbagi menjadi dua, yaitu BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah. Dana BOS pertama kali dikeluarkan pada bulan juli 2005.

##### **2.1.2 Pengertian evaluasi**

evaluasi berasal dari kata bahasa inggris "*evaluation*" yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit

penyesuaian lafal Indonesia menjadi evaluasi yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kualitatif. Namun pengertian evaluasi secara umum adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan. Yang mana dapat diartikan bahwa evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Suchman (dalam anderson 1975) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Defenisi lain dari worthen dan sanders evaluaasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, alam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan stufflebeam (dalam fernandes, 1984) mendefinisikan evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian

informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

### **2.1.3 Pengertian pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan merupakan terjemahan dari kata manajemen istilah inggris tersebut lalu menjadi manajemen, menurut kamus besar bahasa indonesia, kata pengelolaan mempunyai 4 arti yaitu :

1. pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan
2. pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. pengelolaan adalah proses merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi .
4. proses yang memberikan pengawasan pada semua hal terlibat menurut (murniati A,R,) pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal untuk mencapai tujuan khusus dalam organisasi. sedangkan menurut (purwanto,2009) pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya.

### **2.1.3 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana

program wajib belajar, namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS (Anonim,2010:9) sedangkan menurut Permendikbud RI (2014:2) mengemukakan bahwa “Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan pelaksanaannya. Dengan adanya dana BOS diharapkan dapat mensukseskan pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas.

#### **2.1.4 Ketentuan pengelolaan dana BOS**

Berikut ketentuan pengelolaan dana BOS reguler seperti dirangkum dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 3 tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler :

- Dana BOS reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan

pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah

- Perencanaan pengelolaan dana BOS mengacu pada hasil evaluasi dari sekolah
- Sekolah memiliki kewenangan menentukan penggunaan dana BOS sesuai prioritas dan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan dana BOS reguler, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara tim BOS, guru, dan komite dan hasil kesepakatan dituangkan ke dalam berita acara dan ditandatangani peserta rapat.
- Pengelolaan dana BOS di sekolah dilakukan oleh tim BOS sekolah yaitu Kepala sekolah dan anggota yang terdiri dari Bendahara, Guru, Komite, dan Orang tua wali.
- Pengelolaan dana BOS reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya.
- Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah yaitu.
  1. Mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid kedalam dapodik sesuai kondisi riil disekolah
  2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam dapodik

3. Menyusun RABS (rancangan anggaran belanja sekolah) mengacu pada prinsip efektifitas, efisiensi akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS reguler
4. Melakukan input RABS pada sistem yang telah di sediakan oleh kementerian
5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler
6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id);
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dana BOS Reguler melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id)
9. Bertangun jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang di terima
10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana



yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain

11. Menerima pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

### **2.1.5 Tujuan bantuan dana operasional sekolah.**

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada satuan pendidikan (petunjuk teknis BOS 2015) namun Menurut (Anonim, 2010:2) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Berikut penjelasan secara khusus program BOS SD bertujuan untuk

1. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dari biaya sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
2. Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Namun secara umum (petunjuk teknis BOS 2019) program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (spm) pada satuan pendidikan.

1).membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan.

2).membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disatuan pendidikan negeri ataupun swasta.

#### **2.1.6 Sasaran Program dan Besar Bantuan.**

Sasaran program BOS adalah SD baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di indonesia, program kejar paket tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar :

1.SD/SDLB kabupaten : Rp 800.000-/siswa 2019

#### **2.1.7 Waktu Penyaluran Dana**

Tahun anggaran 2019, dana bos akan diberikan selama 12 bulan untuk periode januari sampai Desember 2019.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Waktu penyaluran diharapkan dilakukan dibulan pertama setiap Triwulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat Februari.

### **2.1.8 Sekolah Penerimaan BOS**

Sekolah penerima BOS umumnya memiliki syarat dan kriteria sekolah penerima dana BOS dari kemendikbud baik secara umum maupun secara khusus.

Syarat umum dan kriteria penerima BOS sebagai berikut :

1. Sekolah negeri aktif,
2. Mengisi dapodik 3 semester terakhir,
3. Mmiliki jumlah siswa paling sedikit 60 untuk SD, 90 SMP, 180 untuk SMA/SMK.

Syarat dan kriteria sekolah penerima BOS secara khusus sebagai berikut:

1. Semua sekolah SD/SDLB negeri menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.

3. Bagi sekolah yang menerima BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperebolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dan secara transparan dan akuntabel.
6. Sekolah negeri yang bertaraf RSBI atau SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

### **2.1.9 Pengalokasian dana BOS**

Berikut peraturan pengalokasian dana BOS menurut juknis BOS No 3 tahun 2019 :

#### **A. Pendataan**

Dalam melakukan pendataan melalui Dapodik, Sekolah melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. memfotokopi/menggandakan formulir Dapodik sesuai kebutuhan
2. melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan tentang tata cara pengisian formulir pendataan
3. membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi
4. memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atau kewajaran data profil Sekolah, rombongan belajar, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana
5. memasukkan atau memutakhirkan data ke dalam aplikasi Dapodik secara luring yang telah disiapkan oleh Kementerian, kemudian mengirim ke server Kementerian secara daring
6. wajib mencadangkan seluruh data yang telah dimasukkan (entry)
7. wajib menyimpan formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan di Sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit
8. memutakhirkan data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester

9. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang dimasukkan sudah masuk ke dalam server Kementerian
10. Sekolah memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sudah sesuai dengan kondisi riil di Sekolah.

Tim BOS Reguler kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Sementara tim BOS Reguler provinsi bertanggung jawab terhadap proses pendataan pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.

1. Penetapan Alokasi BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota
  - a. Tim BOS reguler provinsi dan tim BOS reguler kabupaten/kota melakukan kontrol terhadap data jumlah peserta didik di tiap Sekolah sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing apabila terdapat perbedaan dengan data riil di Sekolah.
  - a. Kementerian melakukan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodik sebagai dasar penyampaian usulan

alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota yang akan dikirim ke kementerian keuangan untuk penetapan alokasi BOS reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.

- b. Alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik. Di tiap sekolah yang ada didapodik pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan penambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru.
- c. Pemerintah Pusat menetapkan alokasi BOS Reguler tiap provinsi atau kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan alokasi tiap Sekolah

- a. Alokasi dana BOS Reguler tiap Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di tiap Sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.
- b. Penetapan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah didasarkan pada data hasil batas waktu akhir pendataan (cut off)

Dapodik berikut:

- 1. cut off tanggal 31 Januari; dan
- 2. cut off tanggal 31 Oktober.

- c. Paling cepat satu bulan sebelum tanggal cut off (pre-cut off), tim BOS reguler provinsi mengunduh data sekolah sebagai dasar penyaluran dana BOS reguler sesuai dengan cut off sebagai laman yang disediakan kementerian.
- d. Data pre-cut off tersebut didistribusikan oleh tim BOS reguler provinsi ke tim BOS Reguler kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing untuk diverifikasi ke Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- e. Berdasarkan data pre-cut off tersebut, tim BOS reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota meminta Sekolah untuk memutakhirkan data pada Dapodik sebelum tanggal cut off.
- f. Pada tiap tanggal cut off, tim BOS reguler provinsi mengunduh data Sekolah seluruh jenjang sebagai dasar penyaluran dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan cut off melalui laman yang disediakan Kementerian.
- g. Alokasi BOS Reguler untuk Sekolah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - 1). Triwulan I dan semester I
    - a. Alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran



triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya.

- b. Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alokasi final tiap Sekolah untuk triwulan I dan semester I didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
- d. Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan dalam penyaluran dana BOS Reguler triwulan II dan semester II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Triwulan II

- a) Alokasi tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
- b) Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal

triwulan II (untuk penyaluran triwulanan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Triwulan III, triwulan IV, dan semester II

- a. Alokasi sementara tiap Sekolah untuk penyaluran triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Januari.
- b. Berdasarkan data cut off tanggal 31 Januari ini, provinsi menyalurkan dana BOS Reguler ke tiap Sekolah di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Alokasi final tiap Sekolah untuk triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan.
- d. Berdasarkan data cut off tanggal 31 Oktober ini, provinsi menghitung lebih kurang penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan III dan triwulan IV (untuk penyaluran triwulanan), serta semester II (untuk penyaluran semesteran) untuk dikompensasikan sebelum akhir tahun

anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Data Dapodik yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan alokasi BOS Reguler tiap Sekolah merupakan data individu peserta didik yang telah diinput ke dalam aplikasi Dapodik secara valid, yaitu yang telah terisi lengkap variabel input dan telah dilengkapi dengan nomor induk siswa nasional (NISN), serta lolos proses verifikasi dan validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian.
- f. Kementerian mempunyai kebijakan khusus terkait perhitungan alokasi BOS Reguler bagi:
  - 1) Sekolah Terintegrasi, SMP satu atap, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan
  - 2) SD atau SMP yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada di daerah terdepan, terluar dan sangat tertinggal (daerah 3T) dengan skala satuan daerah yaitu desa. Klasifikasi daerah 3T dari tiap desa mengacu pada hasil klasifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b) Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di Sekolah lain di sekitarnya.

c) khusus untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, telah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik. dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, yaitu memberikan alokasi BOS Reguler minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi Sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik saja.

Pemberian BOS Reguler melalui kebijakan khusus dilaksanakan sebagai berikut.

1) Bagi Sekolah Terintegrasi, SMP satu atap, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB secara otomatis mendapatkan alokasi minimal tanpa harus direkomendasikan oleh dinas pendidikan daerah setempat;

2) Bagi SD dan SMP yang mendapatkan kebijakan khusus dilaksanakan dengan mekanisme:

a) Tim BOS Reguler kabupaten/kota memverifikasi SD atau SMP yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

- b) Tim BOS Reguler kabupaten/kota merekomendasikan SD atau SMP penerima kebijakan alokasi minimal berdasarkan hasil verifikasi dan mengusulkannya kepada tim BOS Reguler provinsi dengan menyertakan daftar Sekolah dan jumlah peserta didik berdasarkan Dapodik.
- c) Tim BOS Reguler Provinsi menetapkan alokasi bagi SD atau SMP penerima kebijakan alokasi minimal berdasarkan surat rekomendasi dari tim BOS Reguler kabupaten/kota. tim BOS Reguler provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim BOS Reguler kabupaten/kota apabila ditemukan fakta atau informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- j. Jumlah alokasi BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah peserta didik dengan NISN yang valid dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.
- k. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan, sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penggabungan Sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik dengan Sekolah sederajat terdekat, kecuali Sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf i. Sampai dengan

dilaksanakannya penggabungan, maka Sekolah tersebut tidak dapat menerima dana BOS Reguler.

#### **2.1.10 Mekanisme Penyaluran Dana**

Menurut juknis No 8 tahun 2020 pasal 8 penyaluran dana BOS reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik dan sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah dana BOS reguler masuk ke rekening sekolah. Kementerian pendidikan dan kebudayaan melakukan perubahan dalam mekanisme penyaluran dana BOS untuk satuan pendidikan negeri dan swasta, Berdasarkan yang diatur pada permendikbud nomor 8 tahun 2020 adapun rincian perubahan aturan tersebut yakni.

Tahun 2019 :

1. Penyaluran dana kesekolah melalui RKUD provinsi.
2. Penetapan SK sekolah penerima oleh provinsi
3. Cut off data sebanyak 2 kali (31 januari tahun sebelumnya dan 31 oktober tahun berjalan)
4. Tahapan penyaluran sebanyak 4 kali (per triwulan)

salah satu pokok kebijakannya adalah proses penyaluran dana BOS reguler tahun 2019 langsung kerekening sekolah. Syarat penyaluran dana BOS adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh nama pribadi).
- 2) Sekolah mengirimkan nomor rekening kepada tim manajemen BOS kabupaten/kota.
- 3) Tim manajemen BOS kabupaten/kotamelakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS provinsi, disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS.

Penyaluran dana BOS :

1. Penyaluran untuk periode Januari-Desember pertahun pelajaran dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
2. Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan
3. Dana BOS diharapkan disalurkan dibulan pertama dari setiap periode tiga bulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat Februari.
4. Khusus penyaluran dana periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah dana BOS periode oktober-desember disesuaikan dengan jumlah yang telah disalurkan periode Juli-September, sehingga total dana periode juli-desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh sekolah.

5. KPPN provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas negara.
6. Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung ke rekening penampung tim manajemen BOS provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor Bank pemerintah/pos yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama anatar diknas pendidikan provinsi.
7. Jika terdapat siswa keluar/pindah kesekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS menjadi hak sekolah lama.
8. Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS direkening penampung akibat dari kelebihan dana atau pengembalian dari sekolah maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara secepatnya.
9. Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana direkening penampung manajemen provinsi, harus disetor ke kas negara.
10. Jika terdapat sisa dana dalam DIPA yang belum dicairkan, setelah seluruh sekolah menerima dana sesuai haknya, maka dana tersebut dapat digunakan sekolah dengan mekanisme penyaluran dan BOS dengan persetujuan dari kementerian pendidikan nasional.

#### **2.1.11 Pengambilan Dana.**

Berikut tahapan pengambilan dana menurut Juknis BOS reguler :



1. Tim manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
2. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana keseluruhan rekening sekolah.
3. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. saldo minimum ini tidak termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalanya kegiatan operasi sekolah.
4. Dana bos harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh tim manajemen BOS kabupaten/kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

#### **2.1.12 Larangan penggunaan dana bos**

Larangan adalah hal yang tidak boleh dilakukan pihak terlibat dalam pengelolaan atau proses penyaluran dana bantuan operasional (BOS) Penting untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan keperluan dana bos.

Menurut juknis No.3 tahun 2019 Dana BOS Reguler tidak untuk:

- a. disimpan dengan maksud dibungakan
- b. dipinjamkan kepada pihak lain
- c. membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis
- d. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring)
- e. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya
- f. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya
- g. membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya
- h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah)
- i. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- j. digunakan untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat
- k. membangun gedung atau ruangan baru

- l. membeli lembar kerja siswa (LKS)
- m. membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- n. membeli saham
- o. membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional
- p. membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan
- q. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian
- r. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya

## **2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan/mempunyai keterkaitan judul dan topik yang akan diteliti, yang juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

**TABEL 2.1 PENELITIAN RELEVAN**

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL
1	Gede Andreyan Semara Bhawa, Iyus Akhmad Haris, Made Artana. (2014)	Efektifitas pengelolaan (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada	Kualitatif	<p>1.mengenai pengelolaan dana (BOS) pada sekolah dasar sekecamatan sukasada mengacu pada permendiknas No.76 tentang petunjuk teknis laporan pertanggung jawaban.</p> <p>2.tingkat efektifitas pengelolaan yang berada di kecamatan sukasada berada dikriteria efektif.</p> <p>3.sering terjadinya keterlambatan dalam penyaluran dana dari pusat ke daerah.</p> <p>b. kurangnya pemahaman oleh komite sekolah tentang pengelolaan dana bos.</p> <p>3.upaya mengatasi masalah tersebut yaitu: -mengatasi keterlambatan dengan pinjaman dan belanja dengan kredit</p> <p>-meningkatkan pemahaman komite terhadap pengelolaan dengan penguatan yang didampingi unit penyelenggara kec sukasada</p>
2	Advionika Resy Bella Putri (2017)	Evaluasi pengendalian pengeluaran kas Bantuan Operasional Sekolah.	Kualitatif	<p>Berdasarkan analisis dan pembahasan pada, pengendalian pengeluaran kas dana BOS sudah berjalan efektif hal ini ditunjukkan dengan :</p> <p>-adanya hal yang ditunjukkan dengan atribut yang memiliki bukti kelengkapan dokumen bukti berupa laporan arus kas, otorisasi pengeluaran kas, dan pengendalian intern pengeluaran kas,</p> <p>-hasil <i>stop and go sampling</i> menunjukkan ketiga atribut memiliki AUPL = DUPL yaitu sebesar 5%.</p>

3	Erdiani Silele, Harijanto Sabijono, Rudy J Pusung. (2017)	Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah SD Inpres 4 kab halmahera barat.	Kualitatif	<p>1. realisasi tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis khususnya dalam penyusunan RKAS yang seharusnya disahkan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah)</p> <p>2. seharusnya difokuskan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengalokasian pada SD 4 inpres sudah sesuai petunjuk teknis dana BOS tahun 2015.</li> <li>- penyaluran dana Sekolah dasar inpres 4 sesuai petunjuk yang ada</li> </ul> <p>3. penggunaan tidak sesuai karena hanya memenuhi 11 dari 13 komponen dikarenakan hanya disesuaikan dengan kebutuhan saja.</p> <p>4. laporan pertanggung jawaban tidak sesuai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- khususnya transparansi karena tidak menyediakan papan atau spanduk tentang pelaporan arus kas dana BOS</li> <li>- dan untuk laporan ekstern tidak sesuai dengan petunjuk dan peraturan mengenai BOS khususnya dalam pembukuan, peneliti menemukan tidak lengkapnya pembukuan dan tidak adanya berita acara pemeriksaan kas.</li> </ul>
4	Ahmad Farid Sapri (2017)	Pengaruh dana BOS dan pendapatan orangtua terhadap prestasi belajar siswa	Kualitatif	1. berdasarkan hasil uji analisis menunjukkan konstanta sebesar 41,21. Jika variabel pendapatan orangtua 0, maka prestasi bernilai 41,261, jika pendapatan orangtua naik maka prestasi meningkat sebesar 0,342 jika nilai BOS tetap maka prestasi meningkat sebesar 0,042

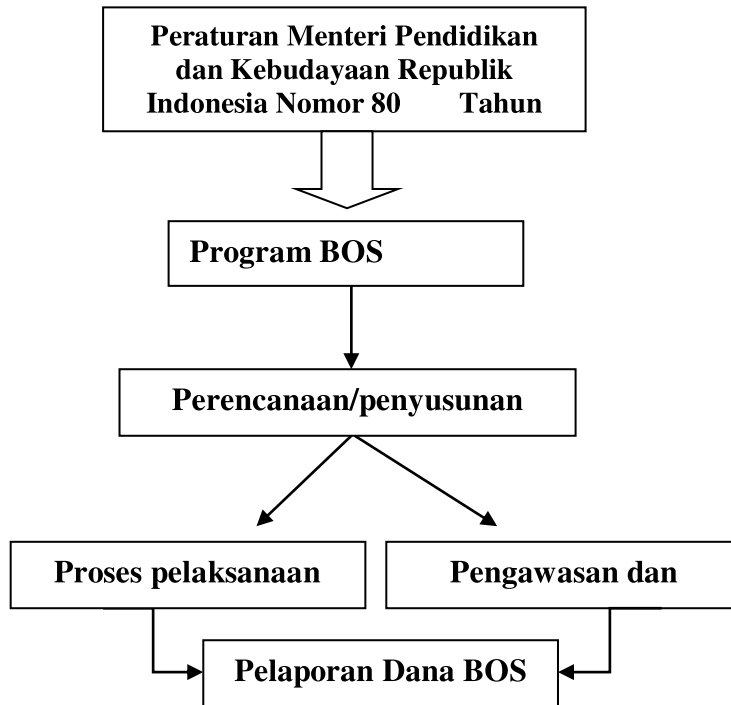
5	Manurung dan hindir (2013)	Penerapan good corporate governance dalam pengelolaan dana BOS dikota malang	Kualitatif	Implementasi pelaksanaan program BOS diwarnai praktik yang kurang sesuai dalam buku panduan pelaksanaan BOS. Dan belum transparannya dan sikap kurang positif
5	Mardiyanti (2017)	Evaluasi pengelolaan keuangan BOS pada SD Negeri di Kab Sleman	Kualitatif	-perencanaan sudah sesuai dengan juknis BOS berikut dengan pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban,pelaksanaan  -sedangkan pengawasan belum semuanya dilakukan sesuai juknis baik dari kepala sekolah maupun tim
6	Kasswandi2015	Evaluasi pengelolaan BOS di Sekolah Dasar Negeri 027 Tarakan.	Kualitatif	1.perencanaan mengenai pengelolaan dana BOS sudah berhasil sesuai dengan indikator berhasilnya yaitu ketepatan penyusunan RKAS diawal tahun anggaran  2.dari aspek pelaksanaan masih terlambatnya penyaluran untuk penggunaan,pembukuan dan administrasi telah sesuai dengan peraturan.  3.aspek pengawasan belum berhasil guna dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari komite sekolah.4.dari pelaporan sudah berhasil dikarenakan telah membuat laporan sesuai dengan peraturan.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Adalah model konsep hubungan antar teori dan faktor masalah yang penting “sugiyono 2010”

Contoh konsep susunan Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah

(BOS).



**Gambar 2.1 kerangka berfikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Sahya Anggara (2015:14) metode penelitian adalah salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara dan langkah ilmiah untuk mengetahui fenomena dan permasalahan yang ada dengan tujuan dan kegunaan tertentu, Yang didalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengevaluasi data secara faktual dan akurat dengan fakta yang ada dilapangan. Dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) .

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Tempat Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini bertempat di SD harapan makmur di Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan Desa Harapan Makmur.

##### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam waktu +- 7 bulan yang dimulai dari proses persiapan hingga selesainya proses penyusunan dan selesai. Terhitung desember Maret-september 2020 dengan susunan sebagai berikut :



No	Uraian	Bulan ke-						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1	Penyusunan proposal	■	■					
2	Pengajuan proposal		■					
3	Perbaikan proposal dan ujian proposal			■				
4	Penelitian				■			
5	Menyusun hasil penelitian				■			
6	Seminar hasil penelitian					■		
7	Ujian komprehensif						■	■

**TABEL 3.1 JADWAL PENELITIAN**

### **3.2 Rancangan penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Harapan Makmur untuk mengevaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS dengan metode deskriptif kualitatif dan dengan menggunakan data sekunder berupa catatan yang berkaitan dengan fokus dan sub fokus penelitian.

### **3.3 Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOS yang terdapat di SD Negeri Harapan Makmur yang berada di Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan yang kemudian masalah tersebut dianalisis dengan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.

### **3.4 Data dan sumber data**

data adalah sekumpulan fenomena atau kemungkinan yang ada dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menurut ‘Kriyantoro’ lebih cenderung menggunakan analisis untuk mengetahui fenomena yang ada dengan melalui pengumpulan data sedalamnya yang mana semakin dalam atau banyak informasi detail maka hasil dari penelitian akan semakin baik pula.

#### **3.4.1 Data Primer**

Hasil wawancara serta observasi lapangan dan pengumpulan data sesuai situasi yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi objek penelitian.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Adalah yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dapat berasal dari beberapa referensi berupa catatan tertulis atau dokumen yang ditemukan selama proses penelitian yang dapat mendukung proses analisis data Jadi dengan ini peneliti dapat memperoleh data dari dokumen, maupun catatan yang ada dilapangan maupun berdasarkan referensi dan buku yang berhubungan dengan topik penelitian.

- Jadi kesimpulannya dalam memenuhi kebutuhan data primer dan sekunder maka penelitian maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana pemenuhan data tersebut dengan metode observasi, wawancara, dokumen, dan beserta catatan yang ada sehingga dapat menunjang penelitian. Baik dari data sekunder maupun primer.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Didalam penelitian ini menggunakan teori Sahya Anggara (2015:109) dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai berikut :

#### **3.5.1 Observasi**

Menurut 'Sahya Anggara (2015:109)' observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat fenomena yang ada untuk menemukan atau mendapat informasi baik melalui pengamatan pencatatan dan analisis yang kemudian dapat dibuat kesimpulannya.

#### **3.5.2 Wawancara**

Menurut Muhammad Ali (Sahya Anggara 2015:113) wawancara adalah adalah salah satu proses pengumpulan data baik secara langsung atau tidak langsung dengan tanya jawab dengan informan terkait dan dicatat ataupun direkam sesuai dengan materi yang telah disiapkan sebelumnya, dan objek yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak terkait SD Negeri Harapan makmur yang akan ditentukan oleh peneliti nantinya.

### **3.5.3 Dokumentasi**

Menurut Sedarmayanti 'Sahya Anggara 2015:121' dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data subjek penelitian yang bersifat tidak langsung yang dapat berupa lampiran hasil wawancara, rekaman ataupun photo pada saat dilaksanakannya penelitian sebagai dokumentasi, dan disusun kebentuk dokumen sebagai sumber data dan bukti yang diperoleh.

### **3.5.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah pihak atau sample dalam sebuah penelitian atau orang-orang yang memberikan dan memiliki informasi tentang masalah yang diteliti, baik individu perorangan atau kelompok didalam suatu organisasi dan diluar organisasi, yang mengetahui informasi mengenai objek yang diteliti, berikut adalah beberapa alasannya :

a. Pembatasan jumlah informan hal ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan informan dengan penelitian dan dalam hal ini beberapa informan yang dimaksud adalah :

1) informan kunci :

- Kepala sekolah
- Bendahara/sekertaris

2) informan pendukung :

- Komite sekolah

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Sahya Anggara (2015:86) Analisis data salah satu proses penyusunan fenomena dalam bentuk data, dalam melakukan analisis data memiliki empat langkah :

#### 3.6.1 Pengumpulan data (*data collection*).

Yaitu pengumpulan data awal atau data mentah yang belum diolah dari hasil wawancara oleh peneliti

#### 3.6.2 *data reduction*

yaitu rangkuman, dalam memilih pokok permasalahan, yang bersifat penting, yang dapat dicari pola dan juga temanya. Sehingga dari reduksi data tersebut dapat memperlihatkan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah menemukan data selanjutnya.

#### 3.6.3 Penyajian (*data display*)

Menyajikan sekumpulan data ataupun informasi yang bersifat sementara sehingga adanya kemungkinan perubahan kesimpulan dan tindakan didalam penelitian. Yang dapat berbentuk grafik, matrik, jaringan dan bagan.

#### 3.6.4 Verifikasi (*conclusion drawing*)

adalah kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah setiap saat bila bukti yang ada kurang kuat untuk mendukung sebuah penelitian dan pengumpulan data berikutnya, dalam masalah ini peneliti menggunakan tehnik. Data collection atau pengumpulan data terlebih dahulu, verifikasi (*conclusion*

drawing), dan data reduksi untuk memudahkan dalam memperoleh data, penjelasan dan penyajian.

### **3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Menurut pernyataan Sugiyono (2014:121-131) pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif meliputi beberapa faktor yaitu uji *creadibilitas* (validitas interbal), *tramsferability* (validitas eksternal) *dependability* (realibitas) dan obyektivitas

#### **3.7.1 Uji kredibibilitas**

Hasil penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan didalam penelitian, berdiskusi, menganalisis kasus negative dan member check serta pengamatan dengan waktu yang panjang.

#### **3.7.2 Pengujian transferability**

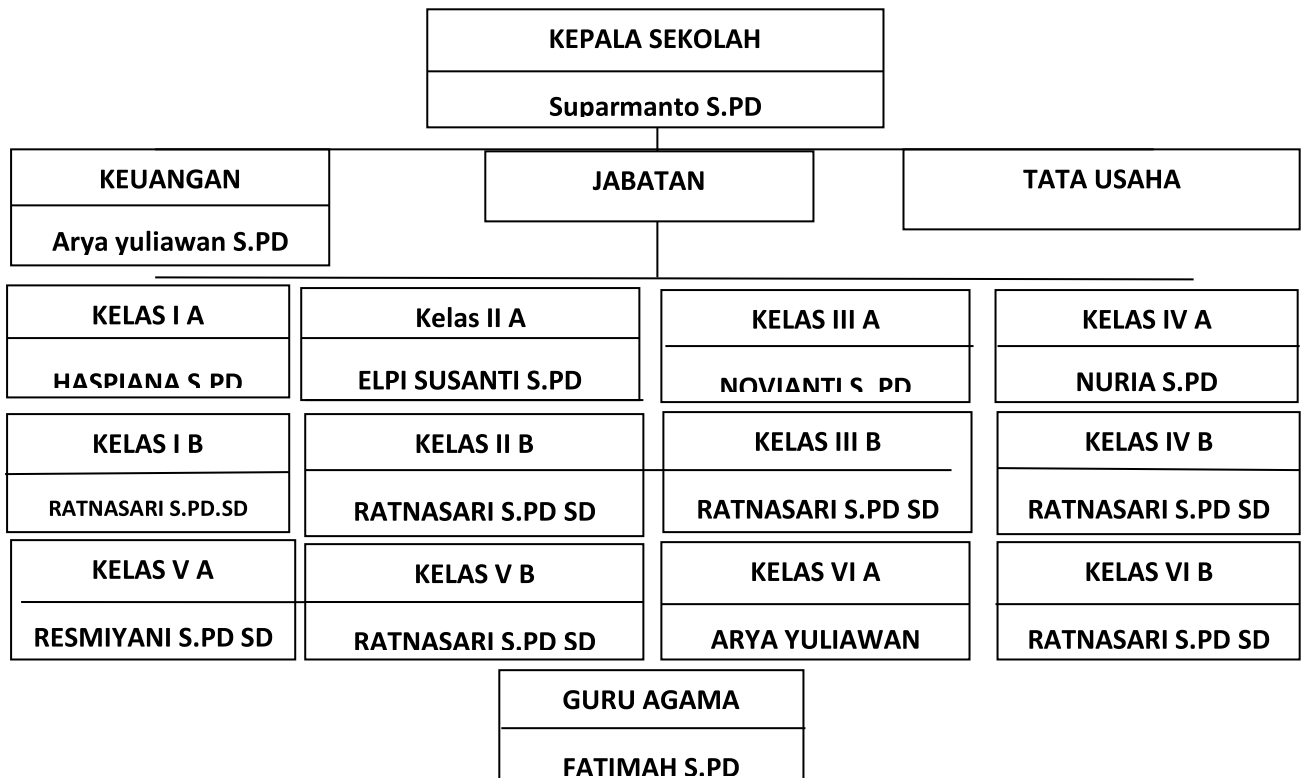
Transfererability berarti hasil dari penelitian dapat digunakan atau diterapkan didalam setiap keadaan lainnya. Seperti yang dikemukakan, bahwa transferbility adalah validitas eksternal didalam kuantitatif yang berarti penelitian yang menunjukkan ketepatan atau hasil penelitian kepopulasi didalam sebuah penelitian yang dimana sumber sampel dapat diterapkan nantinya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

SD Negeri Harapan Makmur berlokasi di Kabupaten Musi Rawas, desa Harapan Makmur. SD ini mulai beroperasi pada tahun 1993/94 yang dikepalai oleh Bapak Samirin Ignasius pada saat mulai beroperasi bernama SD NEGERI HARAPAN MAKMUR yang masih berdiri hingga saat ini, saat ini SD Negeri Harapan Makmur memiliki 9 guru dengan susunan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekolah

jumlah siswa SD Negeri Harapan berjumlah 215 siswa dan jumlah siswa penerima dana BOS sebanyak 197 siswa dengan besaran Rp.800.000 (2019) per tahun nya,

**TABEL 4.1**

**DAFTAR JUMLAH SISWA PENERIMA DANA BOS**

KELAS	Jumlah siswa
Kelas 1	29 siswa
Kelas 2	29 siswa
Kelas 3	35 siswa
Kelas 4	32 siswa
Kelas 5	34 siswa
Kelas 6	38 siswa

yang mana setiap awal tahun periode diawali dengan perencanaan dan penyusunan rencana anggaran belanja sekolah (RABS).

**4.2 Hasil penelitian**

**4.3 Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Awal perencanaan dana BOS pada SD Negeri Harapan Makmur dengan menyusun RABS (rencana anggaran belanja sekolah), dimana RABS disusun pada awal tahun pelajaran. Penyusunan ini dengan mengadakan rapat dengan merancang rencana kegiatan dan anggaran sekolah pada awal tahun anggaran



2019 yang dihadiri masyarakat selaku wali murid, komite sekolah, dewan guru, dan lain-lain. Dengan perhitungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Maka timpembangunan sekolah (TPS) dalam penyusunan RABS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

#### **4.4 Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

##### **4.4.1 Pengalokasian Dana BOS**

Pelaksanaan dana BOS dalam pengalokasian tahun 2019 SD Negeri Harapan Makmur, yaitu dengan mengisi pendataan dalam sistem data pokok pendidikan (Depodikdasmen) lalu mengirimkannya ke dinas pendidikan Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan beberapa wawancara bersama kepala sekolah jumlah siswa di SD Negeri Harapan Makmur sebanyak 197 siswa dari 215 yang menerima bantuan dana BOS berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) republik Indonesianomor 3 tahun 2019 jumlah dana BOS yang didapatkan oleh SD adalah sebesar Rp.800.000- jadi jumlah dana BOS yang didapatkan SD Negeri Harapan Makmur adalah dengan presentase  $197 \times \text{Rp.800.000-}$  sama dengan Rp.157.600.000-. untuk setiap triwulan SD Negeri Harapan Makmur mendapat pencairan dana BOS sebesar Rp.39.400.000-, dengan mekanisme perhitungan jumlah rata-rata dana BOS yang didapatkan dalam satu tahun dibagi empat triwulan menjadi Rp.39.400.000-.

##### **4.4.2 Penyaluran Dana BOS**

Proses penyaluran dana BOS di SD Negeri Harapan Makmur sebagai berikut :

1. Dari kas umum negara (RKUN) dikirimkan ke kas umum daerah (RKUD) yaitu ke BUD provinsi (Bendahara Umum Daerah)
2. Setelah dari kas umum daerah (RKUD) lalu dikirimkan ke masing-masing rekening sekolah.

#### **4.5 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Proses penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019, dengan Indikator kinerja program. Menurut dokumen penggunaan dana yang diperoleh bahwa penggunaan dana BOS oleh SD Negeri Harapan Makmur digunakan untuk pembayaran :

1. Pengembangan perpustakaan termasuk pembelian buku dan kelengkapan pengajar
2. Kegiatan penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah/ rehab ringan dan sanitasi sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
10. Pembiayaan pengelolaan sekolah

#### **4.6 Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut beberapa keterangan dari hasil wawancara kepada Kepala Sekolah dan Bendahara pengawasan di SD Negeri Harapan Makmur masih dinilai

kurang baik dikarenakan pihak komite yang tidak pernah hadir disaat rapat yang membahas mengenai dana BOS dan tidak bisa diketahui alasannya, namun saat peneliti melakukan wawancara dengan komite sekolah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diundang ataupun diminta hadir disetiap kegiatan sekolah terlebih rapat komite pembahasan dana BOS.

#### **4.7 Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS SD Negeri Harapan Makmur untuk laporan intern dan bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 karena dari pembuatan RABS (rencana anggaran belanja sekolah), RAPBS (rencana anggaran pendapatan belanja sekolah), pembukuan dana BOS, serta beberapa bukti transaksi telah dibuat setiap triwulan (2019)

#### **4.8 Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Evaluasi dalam bentuk laporan, pengawasan, dan monitoring. Untuk laporan penggunaan dibuat dalam bentuk laporan berupa RABS, buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, yang dibuat setiap triwulan oleh bendahara, dan untuk pengawasan biasanya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan komite namun komite didalam semua kegiatan kurang berperan aktif dengan alasan tertentu.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Penyusunan RABS SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 yaitu RABS disusun pada awal tahun pelajaran 2019 yang disesuaikan dengan skala prioritas sekolah dan harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik dan orangtua siswa. Lalu disahkan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) hal ini dibuktikan pada surat pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah SD Negeri Harapan Makmur. setelah disetujui oleh dewan guru dan dengan memperhatikan pertimbangan komite sekolah selanjutnya disahkan oleh SKPD Dinas pendidikan.

#### **5.2 Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

##### **5.2.1 Pengalokasian Dana BOS**

Pelaksanaan dalam pengalokasian dana BOS tahun 2019 pada SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 karena dalam pengalokasian dana BOS sekolah ini melakukan pengisian pendataan dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen) berdasarkan jumlah siswa secara offline dan mengirimkannya secara online. Alokasi jumlah dana BOS pada SD Negeri Harapan Makmur untuk dana BOS yang didapatkan adalah jumlah siswa X Rp. 800.000,-.

### 5.2.2 Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS untuk SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 yaitu melalui dua (2) tahapan :

Tahap I : Dari RKUN (rekening kas umum negara) ke RKUD (rekening kas umum daerah) secara triwulan (tiga bulanan) 2019

Tahap II: Dari penyaluran dana BOS dari KUD (kas umum daerah) propinsi ke masing-masing rekening sekolah (rekening SD Negeri Harapan Makmur).

### 5.3 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penggunaan dana BOS pada SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 berupa 11 komponen yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan data dari evaluasi kebutuhan sekolah. 11 komponen menurut petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 penggunaan dana BOS yaitu sebagai berikut :

**TABEL 5.1 ALOKASI PENGGUNAAN DANA BOS**

NO	Program/kegiatan	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	Pengembangan perpustakaan	-	30.762.300	-	-
2	Kegiatan penerimaan siswa baru	-	-	-	-
3	Kegiatan pembelajaran dan eskul siswa	4.643.000	5.890.000	5.890.000	5.445.000
4	Kegiatan evaluasi pembelajaran	4.214.000	7.171.000	6.254.000	5.254.000
5	Pengelolaan sekolah	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.800.000
6	Pengembangan profesi guru	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.600.000

7	Langganan daya dan jasa	3.725.000	5.398.000	5.398.000	6.041.000
8	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	9.380.000	4.620.000	4.620.000	4.620.000
9	Pembayaran honor	4.800.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
10	Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran	-	-	-	-
11	Biaya lainnya	-	-	-	-
12	Total	31.680.000	63.360.000	31.680.000	31.360.000

#### **5.4. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Pengawasan dana bantuan operasional sekolah BOS di SD Negeri Harapan Makmur masih dinilai kurang baik khususnya untuk komite sekolah selaku penghubung pihak masyarakat dan sekolah, hal ini dikemukakan langsung oleh Kepala Sekolah serta Bendahara sekolah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yang mana disetiap kegiatan sekolah terutama rapat pembahasan dana BOS komite sekolah selalu berhalangan hadir dengan alasan yang tidak diketahui, namun disaat peneliti melakukan wawancara dengan komite sekolah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diminta dan diundang hadir dalam setiap kegiatan sekolah.

#### **5.5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS SD Negeri Harapan Makmur untuk laporan Intern bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat

sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019. Laporan pertanggungjawaban dana BOS telah dibuat setiap triwulan (2019) dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS melalui rapat bersama antara kepala sekolah, bendahara sekolah, semua dewan guru, ketua komite sekolah dan orangtua siswa pada setiap triwulan. Tetapi untuk memenuhi transparansi dalam penggunaan dana BOS sekolah ini tidak membuat spanduk atau papan informasi atas penggunaan dana BOS yang seharusnya sekolah harus membuat spanduk yang ditempelkan pada dinding sekolah agar semua pihak dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak untuk mengetahui penggunaan dana BOS (orangtua siswa). Untuk laporan dan pertanggungjawaban ektern dana BOS SD Negeri Harapan Makmur juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 karena pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS dibuat dan dikirimkan setiap triwulan lalu dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (tim manajemen BOS kabupaten/kota). SD Negeri Harapan Makmur bersih dari laporan catatan pengaduan dana BOS karena untuk setiap pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat selalu beritahukan atau dikirimkan kepada pihak yang berhak mengetahui dan menerima pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut. Untuk pembukuan dana BOS SD Negeri Harapan Makmur membuat 4 pembukuan dana BOS terdiri dari buku kas umum BOS, buku pembantu kas, buku Pembantu Bank, dan buku pembantu pajak. Serta opname dan berita acara pemeriksaan kas.

## **5.6 Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Evaluasi dalam bentuk laporan, pengawasan, dan monitoring. Untuk laporan penggunaan dibuat dalam bentuk laporan berupa RABS, buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, yang dibuat setiap triwulan oleh bendahara, sudah sesuai dengan Juknis dan untuk pengawasan biasanya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan komite namun komite didalam semua kegiatan kurang berperan aktif dengan alasan tertentu.

## **5.7 Perbandingan dengan Penelitian terdahulu**

- a. Dondy ekki deonardo (2020) Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD Negeri Harapan Makmur. Metode penelitian kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada tempat dan hasil peneliti. Hasil penelitian ini disimpulkan
  1. Perencanaan sudah sesuai dengan Juknis BOS berikut dengan pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengalokasian, penyaluran.
  2. Pelaporan ekstern sudah sesuai juknis namun pelaporan intern tidak sesuai khususnya transparansi karena tidak menyediakan papan atau spanduk tentang pelaporan arus kas dana BOS.
  3. Sedangkan aspek pengawasan belum semuanya dilakukan sesuai Juknis dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari komite sekolah.
- b. Mardiyanti (2017) Evaluasi pengelolaan keuangan BOS pada SD Negeri di Kab Sleman. Metode penelitian kualitatif, didalam penelitian ini terdapat perbedaan tempat dan hasil penelitian.



1. Perencanaan sudah sesuai dengan juknis BOS berikut dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pelaksanaan.
  2. Sedangkan pengawasan belum semuanya dilakukan sesuai juknis baik dari kepala sekolah maupun tim.
- c. Erdian silele, Harijanto Sabijono, Rudy J Pusung. (2017) Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional SD Inpres 4 Kab Halmahera Barat. Metode penelitian kualitatif, berdasarkan hasil peneliti,
1. Realisasi tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis khususnya dalam penyusunan RKAS yang seharusnya disahkan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah)
  2. Pengalokasian sudah sesuai petunjuk teknis dana BOS dan penyaluran dana sudah sesuai dengan petunjuk yang ada.
  3. Laporan pertanggung jawaban tidak sesuai, khususnya transparansi karena tidak menyediakan papan atau spanduk tentang pelaporan arus kas dana BOS dan laporan ekstern tidak sesuai dengan petunjuk dan peraturan mengenai BOS khususnya dalam pembukuan, peneliti menemukan tidak lengkapnya pembukuan dan tidak adanya berita acara pemeriksaan kas
- d. Kaswandi (2015) Evaluasi pengelolaan BOS di Sekolah Dasar Negeri 027 Tarakan. Metode penelitian kualitatif, didalam penelitian ini terdapat perbedaan tempat dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian :

1. Perencanaan mengenai pengelolaan dana BOS sudah berhasil sesuai dengan indikator berhasilnya yaitu ketepatan penyusunan RKAS di awal tahun anggaran.
2. Dari aspek pelaksanaan masih terlambatnya penyaluran untuk penggunaan, pembukuan, dan administrasi telah sesuai dengan peraturan.
3. Aspek pengawasan belum berhasil dikarenakan kurangnya pengawasan dari komite sekolah.
4. Dari pelaporan sudah berhasil dikarenakan telah membuat laporan sesuai dengan peraturan.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 SIMPULAN**

1. Perencanaan dana BOS pada SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 dalam penyusunan RKAS yang disahkan oleh SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) Dinas pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Tim manajemen BOS kabupaten/kota). Dan telah disetujui oleh dewan guru dan memperhatikan pertimbangan komite sekolah maka selanjutnya disahkan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
2. Dalam pelaksanaan dana BOS yang difokuskan pada:
  - 1) Pengalokasian dana BOS Pengalokasian dana BOS pada SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019, karena sekolah ini telah melakukan pengisian atau melakukan update data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). Jumlah siswa pada SD Negeri Harapan Makmur berjumlah 197 siswa sesuai Juknis BOS 2020 untuk SD mendapatkan alokasi dana BOS Rp.800.000.-, jadi  $197 \times \text{Rp.800.000.-}$  sama dengan Rp.157.600.000. Untuk setiap triwulan sekolah ini mendapatkan pe ncairan Rp.39.400.000.- karena mekanisme jumlah rata-rata dana BOS yang didapatkan dalam satu tahun dibagi empat triwulan.
  - 2) Penyaluran dana BOS pada SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Tahap I : Dari KUN ( Kas umum negara ) ke KUD ( Kas umum daerah)  
Propinsi Sumatera Selatan Tahap II: Dari ke KUD ( Kas umum daerah) Propi  
nsi Sumatera Selatan ke rekening SD Negeri Harapan Makmur.

3. Penggunaan dana BOS pada SD Negeri Harapan Makmur sudah sesuai dengan dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 dari 13 komponen yang bisa di biyai oleh dana BOS.
4. Untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS SD Negeri Harapan Makmur tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019:
  - 1) Laporan intern khususnya dalam transparansi penggunaan dana BOS pada peneliti menemukan bahwa sekolah ini tidak menyediakan papan informasi atau spanduk atas penggunaan dana BOS.
  - 2) Laporan esktern sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 3 tahun 2019 yaitu dengan membuat 4 pembukuan dana BOS terdiri dari buku kas umum BOS, buku pembantu kas, buku Pembantu Bank, dan buku pembantu pajak. Serta opname dan berita acara pemeriksaan kas.
5. Pengawasan dana bantuan operasional sekolah BOS di SD Negeri Harapan Makmur masih dinilai kurang baik khususnya untuk komite sekolah selaku penghubung pihak masyarakat dan sekolah, hal ini dikemukakan langsung oleh Kepala Sekolah serta Bendahara sekolah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yang mana disetiap kegiatan sekolah terutama rapat pembahsan dana BOS komite sekolah selalu berhalangan hadir dengan alasan yang tidak diketahui, namun disaat peneliti melakukan wawancara dengan komite sekolah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diminta dan diundang hadir dalam

setiap kegiatan sekolah, saya rasa disinilah peranan besar pihak pemerintah sekolah dalam mensosialisasikan dan melakukan pendekatan kepada pihak komite sekolah.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi SD Negeri Harapan Makmur untuk kemajuan dimasa depan.

1. kepada pihak sekolah untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pihak komite sekolah kedepannya, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan serta pengawasan oleh komite sekolah selaku penghubung antara masyarakat selaku wali murid.
2. Kepada SD Negeri Harapan Makmur dalam pengelolaan dana BOS harus lebih ditingkatkan transparansi dalam penggunaan dana BOS. Yaitu dengan menyediakan papan informasi atau spanduk informasi mengenai penggunaan dana BOS agar semua pihak dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak mengetahui penggunaan dana BOS yang sudah dikelola.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian dan hasilnya nanti bisa menjadi bahan evaluasi bagi SD Negeri Harapan Makmur, serta bisa menjadi bahan perbandingan untuk penelitian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Erdiani, dkk. 2017. *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. MANADO: Universitas Sam Ratulangi.
- [2] Fitri. A 2014. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) sekolah dasar negeri kecamatan mandi angin koto selayan kota bukittinggi.
- [3] Advionika Resty Bella Putri. 2017. *Evaluasi Pengendalian Internsl Pengeluaran Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jogyajarta: Universitas Sanata Dharma
- [3](Andreyan et al., 2014)Andreyan, G., Bhawa, S., Haris, I. A., Artana, M., Ekonomi, J. P., & Ekonomi, F. (2014). *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada*. 76
- [4] Anonim 2012,program bantuan operasional sekolah(bos).<http://bos.kemendikbud.go.id/home/about>
- [5] Ida Ayu Estri Sanjiwani 2012. analisis biaya pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas proses pembelajaran dan aspirasi pendidikan siswa. Denpasar. Universitas pendidikan ganesha singa raja
- [6] Anggara sahya, 2015. Metode penelitian, bandung;

[7] Sugiyono 2014. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung ; alfabeta. <https://adoc.tips/sugiyono-metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kualitatif10565ff6ea5cec7f00a9decc376995df81672.html>

[8] Bastian, i, 2006, Akutansi pendidikan, jakarta : Penerbit erlangga  
<https://www.goodreads.com/book/show/23394476-akutansi-pendidikan>

[9] Aina Mulyana. 2019. Juknis bos tahun 2019/2020  
<https://ainamulyana.blogspot.com/2017/03/permendikbud-nomor-8-tahun-2017-tentang.html?m=1>

## **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN/WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala Sekolah

1. Identitas Kepala Sekolah
2. Nama : SUPARMANTO S.PD
3. Pendidikan akhir : S1
4. Bagaimana struktur tim manajemen BOS di Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur ?
5. Bagaimana keadaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur ?
6. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Harapan Makmur ?
7. Bagaimana proses pelaksanaan/realisasi di SD Negeri Harapan Makmur ?
8. Bagaimana evaluasi penggunaan dana BOS di SD Negeri Harapan Makmur ?



9. Bagaimana mekanisme pembelian barang/jasa di SD Negeri Harapan Makmur ?
10. Bagaimana kinerja bendahara dalam pengelolaan keuangan ?
11. Bagaimana pengawasan Kepala Sekolah dan Komite ?
12. Apa saja hambatan didalam pelaksanaan program BOS selama ini dan bagaimana solusinya ?

#### Daftar pertanyaan Wawancara dengan Bendahara

1. Identitas bendahara

Nama : ARYA YULIAWAN S.PD

Pendidikan Akhir : S1

2. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RABS ?
4. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Harapan Makmur ?
5. Bagaimana evaluasi pelaksanaan dana BOS ?

#### Daftar Pertanyaan Wawancara Komite Sekolah

1. Identitas komite

Nama ; SOGIRIN

Pendidikan akhir : MA

2. Adakah RABS di Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur ?
3. Apakah komite menghadiri penyusunan RABS ?
4. Bagaimana keterlibatan komite dalam penyusunan RABS ?

5. Sumber dana RABS dari mana saja ?
6. Apakah komite mengetahui pemanfaatan, pengeluaran dalam pelaksanaan dana BOS ?

## **HASIL WAWANCARA**

### Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah

1. Bagaimana struktur tim manajemen BOS di Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur ?
  - Struktur tim manajemen BOS di SD Negeri Harapan Makmur yaitu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan bendahara selaku anggota yang mana harus memiliki sk penunjukan bendhara BOS.
2. Bagaimana keadaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur ?
  - Siswa yang mendapatkan dana BOS sebanyak 197 siswa dengan besran Rp. 800.000 per siswa per tahun.
3. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Harapan Makmur ?
  - dimulai dengan menyusun RABS setiap awal tahun yang melibatkan Kepala Sekolah, dewan guru dan komite sekolah, lalu perencanaan SDM manajemen pengelola dana BOS
4. Bagaimana proses pelaksanaan/realisasi di SD Negeri Harapan Makmur ?
  - dana BOS diberikan melalui rekening sekolah pada awal tahun anggaran, dana bos turun setiap triwulan.

5. Bagaimana evaluasi penggunaan dana BOS di SD Negeri Harapan Makmur ?
  - Untuk evaluasi yaitu berupa laporan penggunaan dana BOS yang dibuat oleh bendahara. Laporan ini dibuat setiap triwulan, yang nanti dilaporkan kepada dinas pendidikan kecamatan.
6. Bagaimana mekanisme pembelian barang/jasa di SD Negeri Harapan Makmur ?
  - Dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu, sebelum melaksanakan pembelian barang/jasa.
7. Bagaimana kinerja bendahara dalam pengelolaan keuangan ?
  - Selama ini cukup baik, namun terkadang sedikit terlambat karena prosedur pembuatan laporan yang rumit, dan keterlambatan dan kurang sinkronnya pencairan dana BOS.
8. Bagaimana pengawasan Kepala Sekolah dan Komite ?
  - Dilakukan setiap hari, juga dengan memeriksa laporan setiap triwulan,
  - Untuk pengawasan oleh komite kurang baik bahkan disaat rapat komite sering tidak menghadiri.
9. Apa saja hambatan didalam pelaksanaan program BOS selama ini dan bagaimana solusinya ?
  - Kebutuhan yang lebih banyak, sedangkan jumlah dana BOS kurang, dan keterlambatan setiap pencairan.
  - Sekolah meminta sumbangan tidak langsung kepada orang tua siswa yang bersifat tidak wajib, sehingga dapat merecovery keterlambatan

pencairan, lalu dengan mengevaluasi kebutuhan yang paling penting yang lebih didahulukan dengan dana BOS.

#### Hasil Wawancara Dengan Bendahara

5. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS ?

- Perencanaan penggunaan dana BOS dimulai dengan rapat penentuan RABS yang dihadiri Kepala Sekolah, dewan guru yang biasanya dilakukan setiap awal tahun ajaran baru, untuk menentukan kebutuhan barang/jasa yang akan didanai dengan BOS.

6. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RABS ?

- Kepala Sekolah, dewan guru, dan komite

7. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Harapan Makmur ?

- Biasanya dana BOS disalurkan setiap tiga bulan sekali/triwulan yang disalurkan langsung lewat rekening sekolah, dengan besaran Rp 800.000 x 197 Siswa yang kemudian pengambilan dilakukan oleh bendahara atau Kepala Sekolah, dan setiap transaksi harus disertakan nota atau kuitansi, baik dilakukan bendahara atau tim manajemen sekolah.

8. Bagaimana evaluasi pelaksanaan dana BOS ?

- Evaluasi dalam bentuk laporan, pengawasan, dan monitoring. Untuk laporan penggunaan dibuat dalam bentuk laporan berupa RABS, buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, yang dibuat setiap triwulan oleh bendahara, dan untuk pengawasan biasanya dilakukan

oleh Kepala Sekolah dan komite namun komite didalam semua kegiatan kurang berperan aktif dengan alasan tertentu.

#### Hasil Wawancara Dengan Komite Sekolah

1. Adakah RABS di Sekolah Dasar Negeri Harapan Makmur ?

-. (komite sekolah kurang mengetahui dikarenakan kurang koordinasi dari pihak sekolah)

2. Apakah komite menghadiri penyusunan RABS ?

-. Belum dikarenakan kurang informasi saat akan diadakan rapat.

6. Bagaimana keterlibatan komite dalam penyusunan RABS ?

-. (komite menjelaskan bahwa ia tidak pernah dipanggil atau dilibatkan dalam hal yang berkaitan sekolah, pernah sesekali )

7. Sumber dana RABS dari mana saja ?

-. Tidak tahu

8. Apakah komite mengetahui pemanfaatan, pengeluaran dalam pelaksanaan dana BOS ?

-. Tidak tahu

#### **BANK DATA SISWA**

### BANK DATA SISWA

TAHUN PELAJARAN : 2019/2020      SEKOLAH : HARAPAN MAKMUR

KELAS	KEADAAN SISWA												GRAFIK ABSENSI						GRAFIK DAYA SERAP					
	I		II		III		IV		V		VI		I		II		III		IV		V		VI	
JULI													100% c6						100%					
AGUSTUS													90% c6						90%					
SEPTEMBER													80% c7						80%					
OKTOBER													70% c8						70%					
NOPEMBER													60% c9						60%					
DESEMBER													50% c10						50%					
JANUARI													40% c11						40%					
FEBRUARI													30% c12						30%					
MARET													20% c13						20%					
APRIL													10% c14						10%					
MEI													0% c15						0%					
JUNI													0% c15						0%					

KELAS	AGAMA SISWA					MUTASI SISWA					HASIL AKHIR						
	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	AWAL BULAN	PERANG MUDA	PERANG KEDUA	BERKUALIFIKASI	BAKOR TAYAN	NO	TAHUN	2	3	4	5	6
I	19	13	2	2	0	19	13	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1
II	20	18	0	0	0	20	18	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
III	29	18	0	0	0	29	18	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
IV	24	13	0	0	0	24	13	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
V	19	19	0	0	0	19	19	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
VI	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
JUMLAH	177	93	0	0	0	177	93	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21

## STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

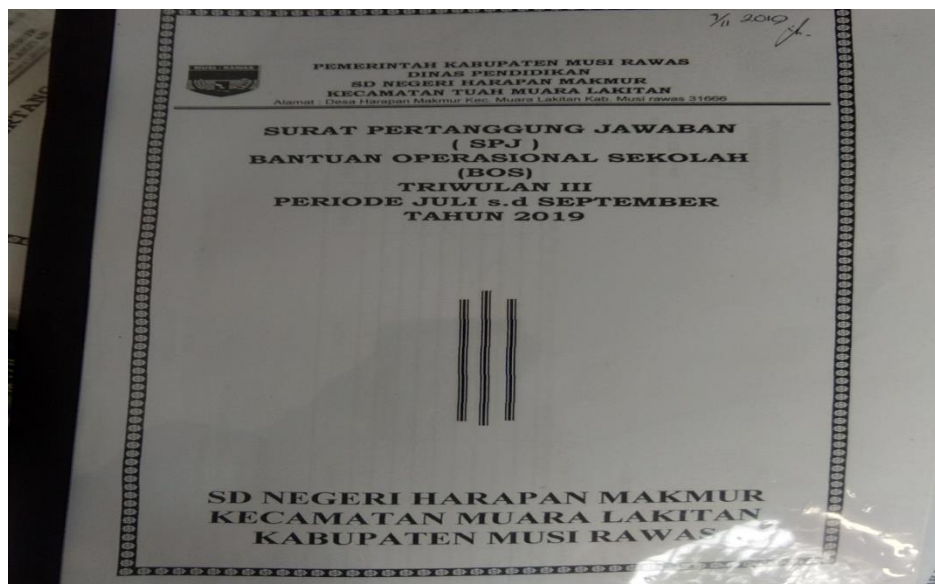
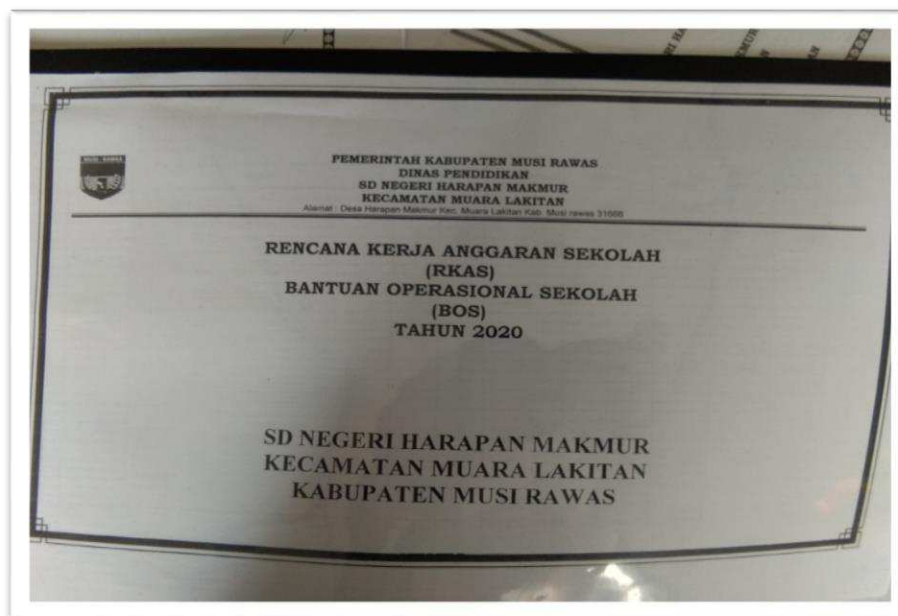


### Keadaan Murid

BULAN	KELAS												RUANGAN			
	I		II		III		IV		V		VI		JUMLAH	PAGIAN NYA	LOKAL YANG DIPERLUKARI	KURVA
JULI																
AGTS																
SEPT																
OKT																
NOP																
DES																
JAN																
PEB																
MAR																
APR																
MEI																
JUNI																

HARAPAN MAKMUR MENGETAHUI  
 KEPALA SEKOLAH  
 SUPARMANTO SPd  
 NIP. 196906141992091001

## LAPORAN RKAS 2020



DOKUMENTASI PENGUMPULAN DATA KEPALA SEKOLAH



DOKUMENTASI PENGUMPULAN DATA WAKIL KEPALA SEKOLAH





DOKUMENTASI PENGUMPULAN DATA KOMITE SEKOLAH



DOKUMENTASI PENGUMPULAN DATA BENDAHARA



